

**PERAN DINAS PENDIDIKAN KOTA YOGYAKARTA DALAM MENGATASI
KONFLIK ANTAR SEKOLAH MENENGAH ATAS
TAHUN 2013-2016**

***THE ROLE OF THE YOGYAKARTA CITY OF EDUCATION SERVICES IN
OVERCOMING THE CONFLICT BETWEEN THE MIDDLE SCHOOL
YEAR 2013-2016***

Yonita Rosyta Sari, Ane Permatasari, S.IP., M.A.
Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
E-mail: rosytayonita@yahoo.com

Abstract

This study aims to describe: (1) the role of the Yogyakarta City Education Agency, and (2) the constraints of the Yogyakarta City Education Office in overcoming conflicts between senior high schools in 2013-2016. This type of research is qualitative research. The subject of this study was the Education Office and the school principal as many as 4 people. Data collection methods use interviews. Data analysis techniques use data collection, data reduction, data display, and conclusions. The results showed that (1) the role of the Yogyakarta City Education Office in overcoming conflicts between senior high schools in 2013-2016 as a facilitator was to create a conducive atmosphere through preventive and curative efforts. The role as a public servant is to hold various extracurricular activities and hold competitions between cities, nationally and internationally. The role as a companion is to intervene so that actions in the form of brawls are not repeated. The role as partner of the Education Office collaborates with third parties. The role of funder is to allocate a budget of Rp. 60 billion for Bosda, both public and private schools, while for JPD, Rp. 30 billion is budgeted. (2) the constraints of the Yogyakarta City Education Office in overcoming conflicts between senior high schools include communication between parents and schools, limited costs for handling more specific, and lack of support and cooperation from other parties.

Keywords: *Department of Education, Yogyakarta and Inter-High School Conflict*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) peran Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, dan (2) kendala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam mengatasi konflik antar Sekolah Menengah Atas Tahun 2013-2016. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah dinas Pendidikan dan kepala sekolah sebanyak 4 orang. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara. Teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Peran Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam mengatasi konflik antar Sekolah Menengah Atas tahun 2013-2016 sebagai fasilitator yaitu menciptakan suasana kondusif melalui upaya preventif dan upaya kuratif. Peran sebagai pelayan masyarakat yaitu mengadakan berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler dan mengadakan kompetisi antar kota, nasional, dan internasional. Peran sebagai pendamping yaitu melakukan intervensi agar tindakan berupa tawuran tidak terulang kembali. Peran sebagai mitra pihak Dinas Pendidikan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Peran sebagai penyandang dana yaitu mengalokasikan anggaran Rp 60 miliar untuk Bosda baik sekolah negeri maupun swasta, sedang untuk JPD dianggarkan Rp 30 miliar. (2) kendala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam mengatasi konflik antar Sekolah Menengah Atas meliputi komunikasi orang tua dan sekolah, keterbatasan biaya untuk melakukan penanganan yang lebih khusus, dan dukungan dan kerjasama pihak lain yang masih kurang.

Kata Kunci: *Dinas Pendidikan, Yogyakarta, dan Konflik Antar Sekolah Menengah Atas*

PENDAHULUAN

Pendidikan hingga kini masih dipercaya sebagai media yang sangat ampuh dalam membangun kecerdasan sekaligus kepribadian anak manusia menjadi lebih baik. Oleh karena itu, pendidikan secara terus-

menerus dibangun dan dikembangkan agar dari proses pelaksanaan menghasilkan generasi yang diharapkan. Demikian pula dengan pendidikan di negeri ini. Bangsa Indonesia tidak ingin menjadi bangsa yang bodoh dan terbelakang, terutama dalam menghadapi zaman yang terus berkembang di era kecanggihan teknologi dan komunikasi. Maka, perbaikan sumber daya manusia menjadi manusia yang cerdas, terampil, mandiri, dan berakhlak mulia terus diupayakan melalui proses pendidikan.

Dalam rangka menghasilkan peserta didik yang unggul dan dapat diharapkan, proses pendidikan juga senantiasa harus dievaluasi dan diperbaiki. Salah satu upaya perbaikan kualitas pendidikan adalah adanya peran dinas pendidikan dalam mengatasi segera kisruh permasalahan yang muncul di dunia pendidikan khususnya di kota Yogyakarta. Gagasan ini muncul karena proses pendidikan yang selama ini dilakukan dinilai belum sepenuhnya berhasil dalam membangun manusia Indonesia yang berkarakter.

Sudiarja, dkk (2006: 227) menjelaskan bahwa pendidikan Indonesia telah gagal dalam membentuk karakter calon generasi penerusnya. Penilaian ini didasarkan pada banyaknya para lulusan sekolah dan sarjana yang cerdas secara intelektual, namun tidak bermental tangguh dan berperilaku tidak sesuai dengan tujuan mulia pendidikan salah

satunya adalah maraknya budaya tawuran antar pelajar khususnya di kota Yogyakarta.

Taufik Rahman (2013) melalui Republika.co.id menjelaskan jika adanya peningkatan tawuran antar pelajar dari Tahun 2013 hingga tahun 2016. Pada artikel tersebut Taufik Rahman (2013) menuliskan jika kasus kekerasan yang melibatkan pelajar pada 2011 tercatat sembilan kasus dan sudah ada tiga kasus yang dilimpahkan ke kejaksaan dan enam kasus lainnya berakhir damai. Sedangkan pada 2012 tercatat sebanyak lima kasus dengan dua kasus dilimpahkan ke kejaksaan sedangkan sisanya berakhir damai. Sementara itu, lima kasus kekerasan yang melibatkan pelajar sepanjang 2013 hingga Mei terjadi di lima kecamatan di Kota Yogyakarta.

Selain itu, pada tahun 2012 Komnas Perlindungan Anak (KPAI) merilis laporan hasil monitoring kekerasan yang terjadi pada anak menunjukkan jumlah tawuran pelajar tahun ini sebanyak 339 kasus dan memakan korban jiwa 82 orang. Tahun sebelumnya, jumlah tawuran antar-pelajar sebanyak 128 kasus. Data Komnas PA merilis jumlah tawuran pelajar tahun 2012 sebanyak 339 kasus dan memakan korban jiwa 82 orang. Tahun sebelumnya, jumlah tawuran antar pelajar sebanyak 128 kasus. Tak berbeda jauh, data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyebutkan, pengaduan kekerasan kepada anak sebanyak 107 kasus, dengan bentuk kekerasan seperti kekerasan

fisik, kekerasan psikis, pembunuhan, dan penganiayaan.

Banyak sekali alasan yang bisa menjadikan tawuran antar-pelajar terjadi. Pelajar sering kali tawuran hanya karena masalah sepele, seperti saling ejek, berpapasan di bus, pentas seni, pertandingan sepak bola, saling ejek di Facebook, yang kemudian sampai menyebabkan nyawa seorang pelajar melayang. Catatan tersebut seolah menampar wajah pendidikan kita, dimana pendidikan dianggap tidak mampu membimbing dan mengarahkan, serta mencetak peserta didik yang unggul dalam pengetahuan dan baik dalam perilaku serta akhlak.

Tawuran antar pelajar merupakan fenomena sosial yang sering dan biasa atau lumrah terjadi di Indonesia, bahkan tawuran sudah seperti menjadi kegiatan rutin dari pelajar yang menginjak usia remaja. Tawuran antar pelajar sering terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, dan kota Surabaya. Para pelajar remaja yang sering melakukan aksi tawuran tersebut lebih senang melakukan perkelahian di luar sekolah dari pada masuk kelas pada kegiatan belajar mengajar.

Tawuran tersebut telah menjadi kegiatan yang turun temurun pada sekolah tersebut, sehingga ada yang berpendapat bahwa tawuran sudah membudaya atau sudah menjadi tradisi pada sekolah tertentu. Dalam kamus bahasa Indonesia tawuran dapat

diartikan sebagai perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang. Sedangkan pelajar adalah seorang manusia yang belajar. Sehingga tawuran pelajar adalah perkelahian yang dilakukan oleh orang yang masih dalam proses belajar.

Alwi (2012) mengartikan tawuran adalah istilah yang sering digunakan masyarakat Indonesia, khususnya di kota-kota besar sebagai perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat. Sebab tawuran ada beragam, mulai dari hal sepele sampai hal-hal serius yang menjurus pada tindakan bentrok.

Alwi (2012) juga menjelaskan jika tawuran merupakan suatu penyimpangan sosial berupa perkelahian. Seiring dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta perkembangan gaya hidup dan pergaulan masyarakat khususnya di kalangan pelajar, demikian pula halnya dengan kondisi pergaulan dikalangan Pelajar SMA. Khususnya di Yogyakarta secara tidak langsung menjadi Terakulturasi, salah satu contoh kongkrit adalah dengan situs Jejaring atau pertemanan Facebook, twitter dan lain-lain yang sangat memudahkan mengenal teman baru.

Idealnya teknologi tersebut mendatangkan pengaruh positif tetapi tidak jarang pengaruh tadi berdampak negatif bagi pelajar itu sendiri, contohnya tindakan mengolok-olok baik pribadi maupun

kelompok. Dampak yang ditimbulkan dari tawuran di kalangan pelajar yaitu kerusakan materi, dan korban jiwa. Hal tersebut sangat bertentangan dengan hak dan tanggung jawab pelajar yang mayoritas usia mereka masih tergolong anak-anak.

Pada penelitian ini akan mengulas peran Dinas Pendidikan DIY dalam mengatasi konflik antar sekolah yaitu tawuran khususnya di SMA Muh. 3 dan SMA Muh. 7 Yogyakarta. Tawuran pada kedua sekolah tersebut menjadi menarik karena konflik tersebut turun temurun dan antar generasi meskipun tidak diwariskan secara khusus antara alumni dengan siswa yang masih tercatat aktif ada di sekolah tersebut. Selain itu, menarik bagi peneliti karena konflik tersebut terjadi tidak hanya dilingkungan sekolah saja tapi dimanapun tempatnya berada ketika siswa SMA Muh. 3 dan SMA Muh. 7 Yogyakarta bertemu konflik tersebut dapat dipicu oleh hal-hal sepele seperti perbedaan dukungan supporter bola, pada saat kompetisi basket antar sekolah, dan bahkan ketika bertemu di jalan tanpa ada pemicu yang pasti dapat menyulut konflik kedua sekolah tersebut.

Pelajar pelaku kekerasan mengembangkan strategi distingsi untuk membedakan identitas mereka dengan kelompok lain, misalnya melalui penampilan dan keberanian. Dalam konteks relasi kuasa, pelajar sesungguhnya tidak hanya berelasi dengan pihak sekolah atau dengan orang tua

mereka, melainkan juga berhadapan dan bernegosiasi dengan sesama pelajar. Dengan memahami akar permasalahan dan dinamika kekerasan pelajar, maka dapat ditentukan strategi yang tepat dan efektif untuk mengatasi dan mencegah terulangnya kembali kekerasan pelajar.

Atas dasar muncul dan maraknya budaya tawuran tersebut, tentunya kondisi ini tidak hanya menjadi pekerjaan rumah bagi guru dan orangtua, akan tetapi pentingnya keterlibatan peran dinas pendidikan kota Yogyakarta supaya budaya itu dapat dihilangkan dari waktu ke waktu. Dwiki Prastianto (2013: 3) menjelaskan jika pada Tahun 2008, Kota Yogyakarta mengeluarkan SK Dinas Pendidikan Yogyakarta No. 188/147/2008 mengenai penyusunan tata tertib sekolah yang salah satu isinya membahas tentang model pakaian sekolah dan atributnya.

Sebuah kebijakan publik yang menggunakan pendekatan top-down untuk mengatasi tawuran pelajar, meletakkan wewenang pembuatan keputusan berada ditangan pihak yang memiliki otoritas, yaitu elit Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Kepala Sekolah dan jajarannya ditempatkan sebagai aktor implementasi untuk mengatur para pelajar. Sedangkan, pelaksanaan program terletak pada peraturan sekolah yang mengharuskan para pelajar untuk mengganti badge sekolah yang semula menunjukkan identitas sekolah masing-

masing, menjadi badge sekolah yang memiliki identitas bersama Pelajar Kota Yogyakarta.

Kebijakan publik yang tujuan akhirnya adalah penyeragaman atribut sekolah dimungkinkan sesuai untuk kondisi kota tertentu, dalam mengatasi tawuran pelajar. Sebab menurut Dwiki Prastianto (2013: 3) tawuran antar pelajar terjadi disebabkan adanya permasalahan identitas yang membentuk sebuah basis geng pelajar. Dwiki Prastianto (2013: 3) memaknai geng pelajar sebagai sebuah komunitas informal yang terdapat didalam sebuah sekolah tertentu, di luar organisasi formal yang diakui oleh sekolah. Geng pelajar memiliki beberapa sifat yang cukup mirip dengan geng dalam kelompok sosial yang lebih besar.

Pentingnya peran Dinas Pendidikan kota Yogyakarta ikut serta dalam mengatasi tawuran antar pelajar tersebut supaya citra baik kota Yogyakarta sebagai kota pelajar dapat terselamatkan dan mampu menunjukkan bahwa sebagai kota Pelajar tentunya siapapun yang belajar di kota *Gudheg* ini adalah untuk menimba ilmu bukan untuk menciptakan kerusuhan yang dapat berdampak negatif buat diri sendiri maupun orang lain.

KAJIAN TEORI

Peran atau peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan, yaitu seseorang yang melaksanakan hak – hak dan kewajibannya (Soekanto, 2006: 212). Peranan menentukan

apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan – kesempatan yang diberikan masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan adalah ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas – batas tertentu dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang – orang sekelompoknya. Hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan individu dalam masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat.

Menurut Danton (2001: 172) ada beberapa peran yang diharapkan dapat dilaksanakan oleh aparat pemerintah dalam menata dan memantapkan pelaksanaan pendidikan yang berbasis masyarakat adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Fasilitator

Pemerintah seharusnya merupakan fasilitator yang ramah, menyatu dengan masyarakat, bersahabat, menghargai masyarakat, mampu menangkap aspirasi masyarakat, mampu membuka jalan, mampu membantu menemukan peluang, mampu memberikan dukungan, mampu meringankan beban pekerjaan masyarakat, mampu menghidupkan komunikasi dan partisipasi masyarakat tanpa masyarakat merasa terbebani.

2. Sebagai Pelayan Masyarakat

Dalam mengembangkan pendidikan berbasis masyarakat seharusnya pemerintah memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Melayani masyarakat, merupakan pilar utama dalam memberdayakan dan membantu masyarakat dalam menemukan kekuatan dirinya untuk bisa berkembang secara optimal. Pemerintah dengan semua aparat dan jajarannya perlu menampilkan diri sebagai pelayan yang cepat tanggap, cepat memberikan perhatian, tidak berbelit-belit, dan bukan minta dilayani. Masyarakat harus diposisikan sebagai fokus pelayanan utama.

3. Sebagai Pendamping

Pemerintah harus melepaskan perannya dari penentu segalanya dalam pengembangan program belajar menjadi pendamping masyarakat yang setiap saat harus melayani dan memfasilitasi berbagai kebutuhan dan aktivitas masyarakat. Kemampuan petugas sebagai teman, sahabat, mitra setia dalam membahas, mendiskusikan, membantu merencanakan dan menyelenggarakan kegiatan yang dibutuhkan masyarakat perlu terus dikembangkan. Sebagai pendamping, mereka dilatih untuk dapat memberikan kontribusi pada masyarakat dalam memerankan diri sebagai pendamping. Acuan kerja yang dipegangnya adalah tutwuri handayani (mengikuti dari belakang, tetapi memberikan peringatan bila akan terjadi penyimpangan). Pada saat yang tepat mereka

mampu menampilkan ing madya mangun karsa (bila berada di antara mereka, petugas memberikan semangat), dan sebagai pendamping, petugas harus dapat dijadikan panutan masyarakat (Ing ngarsa sung tulodo).

4. Sebagai Mitra

Apabila kita berangkat dari konsep pemberdayaan yang menempatkan masyarakat sebagai subjek, maka masyarakat harus dianggap sebagai mitra. Hubungan dalam pengambilan keputusan bersifat horizontal, sejajar, setara dalam satu jalur yang sama. Tidak ada sifat ingin menang sendiri, ingin tampil sendiri, ingin tenar/populer sendiri, atau ingin diakui sendiri. Sebagai mitra, pemerintah harus dapat saling memberi, saling mengisi, saling mendukung, dan tidak bersebrangan dengan masyarakat, tidak terlalu banyak campur tangan yang akan menyusahkan, membuat masyarakat pasif, dan akhirnya mematikan kreativitas masyarakat.

5. Sebagai Penyandang Dana

Pemerintah harus memahami bahwa masyarakat yang dilayani pada umumnya adalah masyarakat yang kurang mampu, baik dalam ilmu maupun ekonomi. Pemerintah berperan sebagai penyedia dana yang dapat mendukung keseluruhan kegiatan pendidikan yang diperlukan oleh masyarakat yang disalurkan berdasarkan usulan dari lembaga pengelola.

Alwi (2012) menjelaskan faktor penyebab tawuran antar pelajar menjadi dua

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal disini adalah faktor yang berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru oleh remaja dalam menanggapi milieu di sekitarnya dan semua pengaruh dari luar.

Perilaku merupakan reaksi ketidakmampuan dalam melakukan adaptasi terhadap lingkungan sekitar. Dalam pandangan psikologis, setiap perilaku merupakan interaksi antara kecenderungan di dalam diri individu (internal), yang sering disebut dengan kepribadian, walau tidak selalu tepat. Sedangkan kondisi di luar (eksternal) adalah factor yang terjadi pada diri individu itu sendiri.

Alwi (2012) menjelaskan dampak tawuran antar pelajar sebagai berikut:

- a. Kerugian fisik, pelajar yang ikut tawuran kemungkinan akan menjadi korban. Baik itu cedera ringan, cedera berat, bahkan sampai kematian.
- b. Masyarakat sekitar juga dirugikan.
- c. Terganggunya proses belajar mengajar.
- d. Menurunnya moralitas para pelajar.
- e. Hilangnya perasaan peka, toleransi, tenggang rasa, dan saling menghargai.
- f. Rusaknya sarana prasarana umum, seperti bus, halte dan fasilitas lainnya. Serta fasilitas pribadi seperti kendaraan sendiri.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Metode penelitian kualitatif dalam

arti penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti berdasarkan logika matematis, prinsip angka, atau metode statistik. Penelitian kualitatif bertujuan mempertahankan bentuk dan isi perilaku manusia dan menganalisis kualitas-kualitasnya, alih-alih mengubah menjadi entitas-entitas kuantitatif (Mulyana, 2007: 150).

Setting Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan Juli 2018. Lokasi penelitian berada di Kantor Dinas Pendidikan Yogyakarta, SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta dan SMA Muhammadiyah 7 Yogyakarta.

Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah anggota dinas Pendidikan sebanyak 1 orang yaitu Drs. Warno Gumelar, M. Pd. Kepala Bagian Sekolah Menengah Atas sebanyak 1 orang yaitu ibu Rr. Suhartati, SH. Kepala Sekolah SMA Muh. 3 Yogyakarta sebanyak 1 orang yaitu Drs. H. Herynugroho, M.Pd. Kepala Sekolah SMA Muh. 7 Yogyakarta sebanyak 1 orang yaitu Berkah Beno Widodo, S. Pd.

Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Analisis Data

Metode pengumpulan data menggunakan wawancara. Teknik analisis data menggunakan model analisis dari Miles & Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, display data, dan kesimpulan. Teknik validitas data

menggunakan teknik triangulasi sumber dan data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan jika peran Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam mengatasi konflik antar Sekolah Menengah Atas tahun 2013-2016 sebagai fasilitator yaitu menciptakan suasana kondusif terhadap pihak-pihak yang terlibat tawuran. Suasana kondusif tersebut dilakukan dengan dua upaya yaitu upaya preventif (pencegahan) dan upaya kuratif (penanganan).

Peran sebagai pelayan masyarakat yaitu membentuk kegiatan dengan melibatkan pemuda-pemudi khususnya siswa supaya menjadi sosok yang mampu menggali potensi dan bakat diri. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler dan mengadakan kompetisi antar kota, nasional, dan internasional. Peran sebagai pendamping Pihak Dinas Pendidikan melakukan intervensi agar tindakan berupa tawuran tidak terulang kembali.

Peran sebagai mitra pihak Dinas Pendidikan menjalin kerja sama dengan pihak ketiga agar mendapat dukungan dari berbagai pihak demi terlaksananya program yang sudah dicanangkan, selain itu juga untuk mencari solusi permasalahan yang dihadapi baik dari Pemerintah Kota sendiri atau dari pihak sekolah. Peran sebagai penyandang dana yaitu mengalokasikan anggaran Rp 60

miliar untuk Bosda baik sekolah negeri maupun swasta, sedang untuk JPD dianggarkan Rp 30 miliar.

Peran merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kedudukan (status) sebagai bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan. Pentingnya peranan adalah ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas – batas tertentu dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang – orang sekelompoknya. Hubungan sosial yang ada dalam masyarakat, merupakan hubungan antara peranan individu dalam masyarakat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di masyarakat. Hal ini mengingat, jika tawuran tidak di atasi sedini mungkin akan menimbulkan dampak bagi orang banyak.

Hal ini sejalan dengan teori Alwi (2012) menjelaskan dampak tawuran antar pelajar mampu menimbulkan kerugian fisik, pelajar yang ikut tawuran kemungkinan akan menjadi korban. baik itu cedera ringan, cedera berat, bahkan sampai kematian; masyarakat sekitar juga dirugikan; terganggunya proses belajar mengajar; menurunnya moralitas para pelajar; hilangnya perasaan peka, toleransi, tenggang rasa, dan saling menghargai; dan rusaknya sarana prasarana umum, seperti bus, halte dan

fasilitas lainnya. serta fasilitas pribadi seperti kendaraan sendiri.

Kendala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam mengatasi konflik antar Sekolah Menengah Atas meliputi masih adanya orangtua yang kurang perhatian terhadap siswa, komunikasi orang tua dan sekolah, keterbatasan biaya untuk melakukan penanganan yang lebih khusus, dan dukungan dan kerjasama pihak lain yang masih kurang.

Tawuran atau Tubir adalah istilah yang sering digunakan masyarakat Indonesia, khususnya di kota-kota besar sebagai perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat. Sebab tawuran ada beragam, mulai dari hal sepele sampai hal-hal serius yang menjurus pada tindakan bentrok. Tawuran paling banyak diartikan sebagai perkelahian massal antara dua kubu siswa suatu sekolah yang sering diakibatkan oleh hal-hal sepele, mulai dari saling mengejek, dan sampai tawuran karena salah satu sekolah memang ingin mengajak tawuran sekolah lain karena hanya ingin bersenang-senang.

Alwi (2012) menjelaskan faktor penyebab tawuran antar pelajar menjadi dua yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal disini adalah faktor yang berlangsung melalui proses internalisasi diri yang keliru oleh remaja dalam menanggapi semua pengaruh dari luar. Perilaku merupakan reaksi ketidakmampuan dalam melakukan adaptasi

terhadap lingkungan sekitar. Dalam pandangan psikologis, setiap perilaku merupakan interaksi antara kecenderungan di dalam diri individu (internal), yang sering disebut dengan kepribadian, walau tidak selalu tepat.

Pelajar SMA dalam ilmu psikologi perkembangan disebut remaja dan mereka beranggapan bahwa mereka bukan kanak-kanak lagi, akan tetapi belum mampu memegang tanggung jawab seperti orang dewasa. Karena itu pada masa remaja ini terdapat kegoncangan pada individu remaja terutama di dalam melepaskan nilai-nilai yang lama dan memperoleh nilai-nilai yang baru untuk mencapai kedewasaan. Hal ini tampak dalam tingkah laku remaja sehari-hari, baik di rumah, di sekolah maupun di dalam masyarakat. Masa remaja adalah suatu tahap kehidupan masyarakat yang bersifat peralihan dan tidak mantap. Di samping itu, masa remaja adalah masa yang rawan oleh pengaruh-pengaruh negatif seperti tawuran, narkoba, kriminal dan kejahatan. Oleh karena itu dibutuhkan pengawasan yang lebih baik dari pihak-pihak terkait guna mencegah pelajar untuk berbuat yang seharusnya tidak dilakukan dimasa remajanya.

PENUTUP

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Peran Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam mengatasi konflik antar Sekolah Menengah Atas tahun 2013-2016 sebagai

fasilitator yaitu menciptakan suasana kondusif melalui upaya preventif dan upaya kuratif. Peran sebagai pelayan masyarakat yaitu mengadakan berbagai macam kegiatan ekstrakurikuler dan mengadakan kompetisi antar kota, nasional, dan internasional. Peran sebagai pendamping yaitu melakukan intervensi agar tindakan berupa tawuran tidak terulang kembali. Peran sebagai mitra pihak Dinas Pendidikan menjalin kerjasama dengan pihak ketiga. Peran sebagai penyandang dana yaitu mengalokasikan anggaran Rp 60 miliar untuk Bosda baik sekolah negeri maupun swasta, sedang untuk JPD dianggarkan Rp 30 miliar.

2. Kendala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dalam mengatasi konflik antar Sekolah Menengah Atas meliputi komunikasi orang tua dan sekolah, keterbatasan biaya untuk melakukan penanganan yang lebih khusus, dan dukungan dan kerjasama pihak lain yang masih kurang.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan di atas maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut.

Bagi Dinas Pendidikan

Berdasarkan hasil Perlu adanya tim khusus dalam menangani masalah tawuran antar pelajar, tidak hanya diserahkan kepada

pihak yang berwajib dan juga perlu adanya pelatihan, seminar maupun workshop terkait isu-isu/ problem dalam penanganan masalah tawuran antar pelajar bagi seluaruh komponen yang berada pada dinas tersebut, sehingga pemahaman tentang tawuran antar pelajar semakin meningkat dan mampu memberikan tindakan yang sesuai.

Bagi Sekolah

1. Sekolah perlu membentuk group kreatifitas siswa yang dapat menyalurkan hobi siswa dalam segi kreatifitas dalam menggambar dan melukis “mural” agar bakat siswa tersalurkan dalam kegiatan yang positif serta didukung penuh oleh sekolah.
2. Sekolah melakukan komunikasi yang lebih intensif dan berkala antara sekolah dan orang tua sehingga dapat berdiskusi untuk mencari solusi terkait permasalahan siswa di sekolah, misalnya melalui pertemuan langsung, sms/pesan singkat, maupun group media sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Alwi, Hasan. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Danton, Sihombing. 2001. *Tipografi Dalam Desain Grafis*. Jakarta: Gramedia.
- Dwiki Prastianto, Muhammad. 2013. *Pergulatan Membangun Identitas (Studi Tentang Formasi, Kontestasi, dan Dinamika Pergulatan Identitas Geng Pelajar GNB di Kota Yogyakarta Periode Tahun 2005-2010)*. *Jurnal Jurusan Politik dan Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial*

dan Politik, Universitas Gadjah Mada.

Mulyana, Deddy. 2007. *Ilmu Komunikasi: Suatu Pengantar*. Bandung : Remaja Rosdakarya.

Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudiarja, A, S J, dkk. 2006. *Karya Lengkap Driyarkara: Esai-esai Filsafat Pemikir yang Terlibat Penuh dalam Perjuangan Bangsaanya*. Jakarta: Gramedia.

Taufik Rahman. 2013. *Angka Kekerasan Pelajar di Yogyakarta Meningkat*. Republika.co.id.
<https://www.republika.co.id/berita/nasional/jawa-tengah-diy%20nasional/13/05/22/mn6wwr-angka-kekerasan-pelajar-di-yogyakarta-meningkat>.